

Judul : Ada kekacauan koordinasi di KPK
Tanggal : Senin, 31 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Ada Kekacauan Koordinasi di KPK

Semua prajurit TNI yang terlibat korupsi harus segera diadili secepat-cepatnya dan diberi sanksi dua kali lipat lebih berat dari sanksi pidana umum yang diberikan untuk sipil.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub@mediaindonesia.com

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai amatir dalam menyikapi kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Langkah KPK yang justru memilih audiensi untuk koordinasi ke Puspom TNI juga merupakan langkah yang keliru.

"Pimpinan KPK amatir dalam kasus ini, langkah TNI juga keliru datang ke KPK, pimpinan KPK yang audiensi ke Puspom TNI juga keliru. Panglima TNI juga tak boleh diam," tegas Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, kemarin.

Usman menuturkan kasus korupsi yang menjerat prajurit TNI itu ialah tindak pidana khusus yang tidak bisa lagi diperdebatkan akan diteruskan di peradilan militer ataupun umum.

"Yang terjadi sekarang bukan tindak pidana umum, melainkan tindak pidana khusus, baik sipil, militer, maupun polisi, sama-sama tunduk pada hukum antikorupsi ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi," ujar Usman.

Narasumber lainnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur, bahkan menyebut ada tindakan akrobatik hukum hingga upaya pembelokan informasi dalam kasus ini.

Menurut Isnur, terdapat kekacauan dalam koordinasi hingga komunikasi di tubuh KPK. Bahkan, pemimpin hingga bawahan saling menyalahkan.

Padahal, dalam UU KPK disebut KPK berwenang menyelidiki, menyidik, hingga menangkap penyelenggara negara atau Kabasarnas karena posisinya ialah jabatan sipil.

"KPK berwenang memimpin, mengoordinasikan mengendalikan tipikor yang pelakunya, umum, militer, dan sipil. Jadi yang perlu dipahami KPK berwenang. UU TNI, menjelaskan itu," tuturnya.

"Jadi kalau ada informasi yang menjelaskan bahwa KPK tak berwenang, itu tentu melanggar hukum dan disinformasi yang salah," tambahnya.

Diadili secepatnya

Pembicara lainnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan menantikan Menhan Prabowo Subianto untuk menyatakan sikap.

"Harus dijelaskan, dalam meng-

hadapi kasus ini bagaimana beliau sebagai Menhan sekaligus capres," ungkap Ray.

Ray menyatakan perlu evaluasi melibatkan TNI dalam jabatan sipil. Menurutnya, militer sering kali tak mau diakui sebagai bukan sipil, melainkan senang bekerja di ranah sipil. Namun, ketika hukum sipil diberlakukan, mereka tak mau menjalankannya.

"Kita ingatkan TNI, tingkat kepercayaan masyarakat sekarang baik jika dibandingkan dengan institusi negara lain. Ini menurut saya dapat mencoreng TNI," ujarnya.

"Apa yang dilakukan militer saat ini saya kira mereka sedang menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap TNI," tambahnya.

Oleh karena itu, Ray mendesak agar semua prajurit TNI yang terlibat korupsi harus segera diadili secepat-cepatnya dan diberi sanksi dua kali lipat lebih berat dari sanksi pidana umum yang diberikan untuk sipil.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Polemik itu muncul karena ada prajurit TNI aktif yang diduga terlibat korupsi.

"Saya pikir untuk menengahi kesalahpahaman ini, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan atasan langsung KPK, bisa mengajak kedua belah pihak pimpinan untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan dari atas sehingga di bawah juga bisa kondusif," katanya. (Fah/X-5)